

EVALUASI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

Hasim As'ari, Zulkarnaini, dan Mimin Sundari Nasution

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5
Simpang Baru Panam-Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277.

Abstract: Policy Evaluation and Development Priorities in Efforts to Strengthen Economic Community. This study aimed to evaluate the implementation of economic development in an effort to strengthen society, find problems faced by the community in efforts to strengthen the economy, and finding the kinds of development that most prioritized in efforts to strengthen the local economy. This research was conducted in Rupert, as an area that includes regional, remote and outer (3T). The informants are North Rupert Head, head village of Teluk Rhu, head village of Pangkalan Nyirih, and several community leaders. Data collection technique was interview and observation. The data analysis is qualitative model from data collection, presentation of data, data reduction and conclusion. The results showed that the implementation of local development 3T still not up, there are still many problems faced by the people, either living as fishermen, farmers, and traders.

Keywords: policy evaluation, development priorities, 3T

Abstrak: Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat, menemukan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam upaya penguatan ekonominya, dan menemukan jenis-jenis pembangunan yang paling diprioritaskan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pulau Rupert, sebagai daerah yang termasuk daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Informan penelitian adalah Camat Rupert Utara, Kepala Desa Teluk Rhu, Kepala Desa Pangkalan Nyirih, dan beberapa orang tokoh masyarakat. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis data adalah model kualitatif mulai dari pengumpulan data, pemaparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah 3T masih belum maksimal, masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik yang berprofesi sebagai nelayan, petani, maupun pedagang.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, prioritas pembangunan, 3T

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kehidupan yang lebih baik, yang dilakukan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aspek ekonomi. Pembangunan yang dilakukan diharapkan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian tentang evaluasi dan

prioritas kebijakan pembangunan dalam menguatkan perekonomian masyarakat di daerah 3T ini sangat penting dilakukan, karena pembangunan yang dilakukan di daerah 3T khususnya di Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat lokal. Padahal pemerintah sudah banyak mengemukakan kebijakan dalam bentuk program-program untuk membangun Pulau Rupert, baik program pembangunan infrastruktur,

maupun pembangunan dalam bentuk program-program, seperti UED/K-SP, PNPM, INBUP, PPD, dan ADD.

Kabupaten Bengkalis memiliki visi: “*Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia*”. Visi tersebut dirinci dalam bentuk misi sebagai berikut: 1) Terwujudnya pemerintah yang berwibawa dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas, 2) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat, 3) Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spasial, yakni: 1) Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun, 2) Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat, 3) Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan. 4) Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupt sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Dari uraian visi dan misi Kabupaten Bengkalis di atas, terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan Pulau Rupt sebagai pusat kegiatan pembangunan, yakni sebagai Gerbang Pesisir, yang fokus pembangunannya adalah pada pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Dalam rangka membangun Pulau Rupt menjadi Gerbang Pesisir tersebut, Pemerin-

taf Daerah Kabupaten Bengkalis selama ini sudah banyak mengucurkan program-program pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dikucurkan kebijakan dalam bentuk program-program tersebut adalah untuk menguatkan perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya diharapkan akan mencapai pada tujuan utama dibautnya sebuah kebijakan yakni mensejahterakan masyarakat.

Namun, apakah tujuan mulia dari dibuatnya kebijakan dalam bentuk program-program tersebut sudah tercapai? Pertanyaan besar ini akan dapat dijawab tentunya setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud secara komprehensif. Evaluasi kebijakan memang sangat penting untuk dilakukan, untuk menghindari terjadinya kesalahan, khususnya dalam implementasi kebijakan. Setelah kebijakan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan, dan untuk menilai apakah kinerja kebijakan itu baik atau tidak, maka harus dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup untuk menentukan kebijakan berikutnya, apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan ataukah harus dihentikan dan direvisi atau bahkan diganti dengan kebijakan baru, apalagi kebijakan yang berhubungan dan memberi dampak yang luas pada kehidupan masyarakat.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) mengatakan bahwa “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Terkait dengan evaluasi, Ernest R. Alexander dalam sebagaimana dikutip Ami-

nudin (2007), mengatakan bahwa metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu: 1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya, 2) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*), 3) *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti, 4) *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti, 5) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Sedangkan model evaluasi menurut Scriven sebagaimana dikutip Aminuddin (2007), ada dua yaitu: 1) *Goal Free Evaluation* Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan). 2) Evaluasi formatif-sumatif, Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif,

yaitu kontrol dan waktu. Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

Terkait dengan evaluasi kebijakan, Dunn (2003) mengatakan bahwa evaluasi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan: “apa perbedaan yang dibuat?” atau tentang “nilai” (berapa nilainya?), bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada), atau aksi (apakah yang harus dilakukan?). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai yakni memberi sumbangan pada tujuan dan atau sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan telah mampu diatasi.

Dunn (2003) mengatakan bahwa terdapat enam kriteria dalam evaluasi kebijakan publik sebagai berikut: 1) Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai? 2) Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 3) Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? 4) Pemerataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu? 5) Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai kelompok tertentu? Dan 6) Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah 3T, di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, mengidentifikasi kendala-kendala

yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah 3T, dalam menjalankan perekonomiannya, dan menemukan jenis-jenis pembangunan yang paling diprioritaskan dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat di daerah 3T di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Pengumpul data adalah peneliti sendiri, dengan teknik yang digunakan yakni wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi langsung terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik itu dari implementornya maupun dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri. Adapun informan dari implementor kebijakan, terdiri dari: Camat Rupa Utara, Kepala-kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat, sedangkan dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan, terdiri dari: perwakilan petani, perwakilan nelayan, perwakilan buruh, dan perwakilan pedagang. Teknik analisa data adalah dengan analisa kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan pemerintah dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat di daerah 3T sangat diharapkan sekali oleh masyarakat,

khususnya kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, program-program bantuan, pelatihan, maupun pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada bulan Agustus 2016, pemerintah sudah banyak mengkurcurkan program-program pembangunan di daerah 3T ini, khususnya di Desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih yang menjadi lokasi pilihan dalam penelitian ini. Adapun program-program yang sudah ada dan dilaksanakan antara lain: pembangunan infrastruktur jalan, jembatan (jembatan sungai simpur, dermaga), Program UED-SP, pembangunan gedung (gedung pendopo, gedung kesenian, palatihan untuk kelompok tani, bantuan bibit, program keluarga harapan (PKH), program instruksi bupati (inbup) untuk pembangunan infrastruktur, program alokasi dana desa (ADD).

Pada tahun 2016, Kecamatan Rupa Utara mendapat kucuran dana dalam program pembangunan infrastruktur sebesar 2,730 milyar rupiah, yang digunakan untuk pembangunan semenisasi jalan dwikora, pembangunan pendopo, pembangunan gedung kesenian, pembangunan jalan beton, pembangunan dermaga. (wawancara dengan Camat Rupa Utara pada bulan Agustus 2016). Selain program-program di atas, ada juga program-program yang diberikan khususnya kepada masyarakat dengan mata pencaharian yang berbeda, antara lain: program yang diberikan kepada nelayan: mesin sangkut 15 PK, speedboat/piber, jaring (alat penangkap ikan), pompong, kapal yang dilengkapi teknologi untuk menangkap ikan, penanaman pohon bakau, perumahan bagi para nelayan dari Dinas Perikanan sebanyak 10 unit, dan pelatihan pengolahan hasil tangkapan ikan dari Dinas Perikanan. Program yang diberikan kepada petani; bibit padi, bibit karet, pupuk, racun, jalan lingkungan ke lokasi pertanian. Dan program yang diberikan kepada Pedagang; Program pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat adalah dalam bentuk program Usaha Ekonomi Desa Simpan

Pinjam (UED-SP). Program ini yang paling banyak dirasakan kepada masyarakat pedagang, mereka dapat meminjam kepada pengelola UED-SP untuk menambah modal usahanya.

Untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah 3T, diukur dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang disebutkan oleh William N. Dunn (2003), yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektifitas

Terkait dengan efektifitas pelaksanaan program-program yang telah dikurikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada desa-desa yang berada di daerah 3T, maka, berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih, khususnya program yang diberikan kepada masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan, sebagai berikut:

“Setelah mereka diberi banyak program dari pemerintah, kehidupan ekonomi keluarga mereka tetap biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Kadang-kadang sampai bantuan yang diberikanpun dijual seperti piber. Memang itulah kenyataannya pak”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

“Tapi itu dilakukan ada penyebabnya pak, kalau piber itu dijual karena para nelayan disini rata-rata tidak menggunakan piber pak, kalau piber tu kan harus selalu di air terus, sementara kami disini para nelayan sudah terbiasa pakai sampan yang terbuat dari kayu, setelah selesai digunakan untuk menangkap ikan, langsung ditarik kedarat, jadi piber yang diberikan tu tak cocok dengan nelayan kami disini, itulah makanya mereka menjualnya. Selain itu pak, mesin piber yang diberikan mereknya Tohatsu, tohatsu itu alatnya atau suku cadangnya sudah dicari, tidak ada di sini, disini alat-alat mesin laut yang paling mudah dicari adalah alat-alat dari Malaysia, seperti Yamaha,

Suzuki banyak. Jadi para nelayan yang menjual alat-alat bantuan tadi tujuannya untuk membeli lagi dengan mesin yang bermerek Yamaha atau Suzuki. Sehingga piber-piber bantuan pemerintah itu sekarang tidak ada lagi, walaupun ada tapi tidak banyak lagi, karena sudah diganti oleh para nelayan dengan mesin Yamaha dan Suzuki” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

“Pernah diberikan bantuan berupa kapal besar khusus untuk menangkap ikan yang dilengkapi dengan robot penarik jaring, mereka tetap saja tidak berani, karena untuk kapal-kapal besar tersebut biasanya untuk menjaring ikan di laut luas, mereka tidak berani, akibatnya kapal bantuan itu tidak digunakan sampai sekarang, padahal sudah bermilyaran rupiah harganya” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

Dari kutipan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program yang diberikan khususnya kepada nelayan belum mencapai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. Namun faktanya banyak program yang diberikan tidak cocok dengan kondisi dan kebiasaan nelayan di desa tersebut. Atau boleh dikatakan bahwa program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang ada di daerah 3T khususnya di desa Teluk Rhu yang berada di Pulau Rupert belum efektif.

Terkait dengan efektifitas kebijakan pembangunan di Pulau Rupert, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abd. Ghofur (2014) menyimpulkan bahwa, kebijakan pembangunan Pulau Rupert sebagai pulau terluar masih terkesan lamban dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satu faktor kendalanya adalah tidak adanya *sharing program* dan *sharing budget* antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Diantara program prioritas saat ini di pulau Rupert oleh pemerintah pusat dalam RPJPN adalah menetapkan Pulau Rupert sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pengembangannya untuk dijadikan ka-

wasan wisata nasional. Bentuk programnya salah satunya membuat Kota Terpadu Mandiri (KTM) sejak tahun 2010 berpusat di Desa Pangkalan Nyirih. Realisasinya masih tersendat-sendat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih, diungkapkan sebagai berikut:

“Program pemerintah kepada petani diberikan berdasarkan kelompok-kelompok tani, berupa bibit padi, bibit karet, racun, pupuk”.

“Di Dusun Sungai Pucuk itu pak, orang Jawa Medan baru datang sekitar 10 sampai 15 tahun (mereka datang sekitar tahun 1999), sekarang mereka sudah bisa menguliahkan anak, bias membeli mobil, sementara orang kami (nelayan) hanya menjadi kuli saja pak”.

“Dusun Sungai Pucuk pernah mendapat juara II tingkat nasional dalam pengelolaan kelompok tani. Penduduk di Sungai Pucuk ini, membeli tanah dari penduduk tempatan, dan kebiasaan orang kami ni pak (orang melayu) adalah kalau memiliki lahan mudah menjualnya”.

Dari kutipan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program yang diberikan khususnya kepada petani di Desa Teluk Rhu, khususnya di dusun Sungai Pucuk sudah mencapai hasil yang maksimal. Penduduk dusun Sungai Pucuk sudah boleh dikatakan memiliki perekonomian keluarga yang cukup kuat, yang dibuktikan dengan kemampuan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pendidikan tinggi, kemudian mereka mampu membeli alat transportasi pribadi, bukan sekadar roda dua, namun juga roda empat.

Bantuan pemerintah berupa bibit, pupuk, racun, dan jalan-jalan menuju akses perkebunan mereka sangat membantu bagi masyarakat untuk mengolah kebun mereka, sehingga pada gilirannya mereka mendapat hasil perkebunan yang maksimal. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa program pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat petani yang ada di daerah 3T khususnya di desa Teluk Rhu yang berada di Pulau Rupa sudah efektif. Namun tidak dipungkiri juga, bahwa program UED-SP ini juga masih memiliki kelemahan, seperti adanya para pedagang yang kesulitan untuk membayar pinjamannya, akibatnya terjadi semacam kredit macet pada usaha UED-SP ini.

Efisiensi

Efisiensi berbicara tentang sudah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, sudah berapa banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi masyarakat yang berada di daerah 3T. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan ekonomi masyarakat di daerah 3T ini boleh dikatakan sudah banyak, yakni dalam bentuk program-program pemerintah. Namun apakah semua program-program yang diberikan tersebut efisien atau tidak, maka perlu dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Camat Rupa Utara, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih, sebagai berikut:

“usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan ekonomi masyarakat sudah banyak, baik dalam bentuk jalan untuk mempermudah akses, dalam bentuk bantuan, maupun dalam bentuk pelatihan. Untuk pembangunan infrastruktur saja, di tahun 2016, kecamatan Rupa Utara mendapat dana sebesar 2,730 Milyar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun jalan, dwikare, dermaga, pendopo, dan gedung kesenian. Selain dana tersebut ada juga dana-dana yang langsung dikelola di desa-desa, seperti ADD, Inbup, DD (Dana Desa dari Pusat)” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa dana yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk membangun infrastruktur di Kecamatan Rupa Utara sudah

termasuk besar, karena selain dana yang dikelola oleh kecamatan, disetiap desa yang ada di kecamatan juga sudah mendapat dana yang dapat dikelola langsung oleh masing-masing desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Instruksi Bupati (Inbup), dan Dana Desa (DD). Dilihat dari banyaknya dana yang masuk ke Kecamatan Rupert Utara dan dana yang masuk langsung ke desa-desa yang ada di Kecamatan Rupert Utara, maka dapat diketahui bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membangun dan menguatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sudah maksimal.

Terkait dengan banyaknya dana yang dikucurkan, apabila dilihat pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan gedung lainnya memang sudah mendapatkan hasil maksimal, namun semua itu belum begitu berdampak pada penguatan ekonomi bagi masyarakat yang berada di Pulau Rupert umumnya. Sebagaimana fakta yang penulis temukan di Desa Pangkalan Nyirih dan tidak menutup kemungkinan desa-desa lain yang ada di Pulau Rupert, banyak pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang dibangun hanya di jalan-jalan lingkungan yang ada pemukiman masyarakat saja. Sementara para pelaksana kebijakan lupa, bahwa untuk menguatkan ekonomi masyarakat, maka akses jalan menuju lahan-lahan pertanian atau perkebunan masyarakat juga sangat penting untuk dibangun. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Pangkalan Nyirih pada bulan September 2016, sebagai berikut:

“... sudah berbuih mulut kami meminta untuk dibangun jalan menuju kebun karet kami, namun sampai saat ini, belum juga terrealisasi. Jalan menuju kebun masyarakat di desa kami sangat sulit dilalui, padahal dari situlah kami mengais rezeki setiap hari untuk menghidupi keluarga kami, jalannya semak, kalau musim hujan becek, dan bahkan banjir karena tidak ada badan jalan yang jelas”

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program pemerintah

dalam bentuk pembangunan infrastruktur belum berjalan secara efisien, karena sudah banyak usaha yang dilakukan namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya dalam hal menguatkan ekonomi masyarakat. Usaha membangun jalan masih sekadar untuk memudahkan akses jalan lingkungan yang ada pemukiman, namun untuk menuju kepada penguatan ekonomi masyarakat seperti ke kebun-kebun pertanian masyarakat masih minim.

Selanjutnya, sejauhmana usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, berikut disajikan kutipan hasil wawancara kepada Tokoh masyarakat desa Teluk Rhu, sebagai berikut:

“... Perahu piber itu dijual karena para nelayan disini rata-rata tidak menggunakan piber pak, kalau piber tu kan harus selalu di air terus, sementara kami disini para nelayan sudah terbiasa pakai sampan yang terbuat dari kayu, setelah selesai digunakan untuk menangkap ikan, langsung ditarik kedarat, jadi piber yang diberikan tu tak cocok dengan nelayan kami disini, itulah makanya mereka menjualnya. Selain itu pak, mesin piber yang diberikan mereknya Tohatsu, tohatsu itu alatnya atau suku cadangnya sudah dicari, tidak ada di sini, disini alat-alat mesin laut yang paling mudah dicari adalah alat-alat dari Malaysia, seperti Yamaha, Suzuki banyak. Jadi para nelayan yang menjual alat-alat bantuan tadi tujuannya untuk membeli lagi dengan mesin yang bermerek Yamaha atau Suzuki. Sehingga piber-piber bantuan pemerintah itu sekarang tidak ada lagi, walaupun ada tapi tidak banyak lagi, karena sudah diganti oleh para nelayan dengan mesin Yamaha dan Suzuki” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

“Pernah diberikan bantuan berupa kapal besar khusus untuk menangkap ikan yang dilengkapi dengan robot penarik jaring, mereka tetap saja tidak berani, karena untuk kapal-kapal besar tersebut biasanya untuk menjaring ikan di laut luas, mereka

tidak berani, akibatnya kapal bantuan itu tidak digunakan sampai sekarang, padahal sudah bermilyaran rupiah harganya” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat terlihat jelas bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membantu masyarakat nelayan agar perekonomian keluarganya meningkat, namun karena program yang diberikan dalam bentuk bantuan tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan, dimana kebiasaan masyarakat menggunakan sampan kayu, selesai menjaring ikan langsung sampannya ditarik ke darat, maka tujuan yang diinginkan oleh pemerintah untuk menguatkan ekonomi keluarganya tetap saja tidak meningkat.

Selain itu, pemerintah dalam memberikan bantuan kapal besar yang khusus digunakan untuk menangkap ikan, yang dilengkapi dengan peralatannya, juga tidak berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Hal ini terjadi karena pemerintah dalam memberikan bantuan tidak memperhatikan keadaan kelompok sasaran. Masyarakat nelayan di Pulau Rupa sudah terbiasa menjaring dengan sampan perahu dengan mesin tempel yang hanya mampu berlayar sampai di pinggiran laut saja, namun kapal besar yang diberikan, khusus untuk menjaring ikan di laut besar, kebanyakan masyarakat nelayan tidak berani dan tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan kapal tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program-program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penguatan ekonomi keluarganya masih belum efisien. Banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menguatkan ekonomi masyarakat nelayan, namun tidak mencapai hasil yang diinginkan.

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga mendapat program bantuan dari pemerintah, sejauhmana usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, berikut disajikan kutipan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Pan-

gkalan Nyirih, sebagai berikut:

“usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan ekonomi masyarakat antara lain; membantu petani dalam bentuk pemberian pupuk, bibit karet, dan racun rumput”.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Pangkalan Nyirih di atas, diketahui bahwa masyarakat desa Pangkalan Nyirih yang berprofesi sebagai petani juga mendapat bantuan dari pemerintah. Namun, fakta yang penulis amati dilapangan, khususnya para petani karet masih saja berpenghasilan yang tidak jauh berbeda dengan sebelum mendapat bantuan pemerintah. Karena mayoritas masyarakat desa Pangkalan Nyirih memiliki kebun karet yang luas, namun karetnya adalah karet kampung. Karet kampung ini sangat tidak efisien dalam pengelolannya, karena harus disadap dalam waktu lama dengan hasil yang sedikit. Keadaan ini berpengaruh terhadap program yang diberikan pemerintah, yakni program pemerintah yang diberikan tidak memberikan hasil sebagaimana yang diinginkan.

Berbeda dengan petani yang ada di Desa Teluk Rhu, mereka juga mendapat bantuan yang sama dari pemerintah, namun mereka lebih maju dari petani karet yang ada di desa Pangkalan Nyirih. Para petani yang ada di Desa Teluk Rhu rata-rata pendatang yang dating dari Sumatera Utara, mereka sudah memiliki keterampilan dalam bertani dan berkebun, baik berkebun karet maupun sawit, sehingga mereka lebih berhasil. Keahlian para petani yang ada di Desa Teluk Rhu ini berpengaruh terhadap program pemerintah yang diberikan kepada mereka. Sedikit saja usaha atau stimulus dalam bentuk program bantuan yang diberikan pemerintah, para petani sudah mendapatkan hasil yang diinginkan maksimal, sebagaimana yang terjadi di Dusun Sungai Pucuk desa Teluk Rhu, berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Teluk Rhu, sebagai berikut:

“... di Dusun Sungai Pucuk itu pak, orang Jawa Medan baru datang sekita 10 sampai 15 tahun (mereka datang sekitar

tahun 1999), sekarang mereka sudah bisa menguliahkan anak, bisa membeli mobil, sementara orang kami (nelayan) hanya menjadi kuli saja pak, tukang potong karet mereka, karena tidak punya kebun”. “Dusun Sungai Pucuk pernah mendapat juara II tingkat nasional dalam pengelolaan kelompok tani. Penduduk di Sungai Pucuk ini, membeli tanah dari penduduk tempatan, baru selanjutnya mereka mengolahnya”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pemerintah yang diberikan kepada para petani berbeda tingkat efisiensinya antara desa Pangkalan Nyirih dengan desa Teluk Rhu. Di desa Pangkalan Nyirih belum efisien, karena banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk para petani agar mereka meningkatkan kehidupan perekonomiannya, namun kenyataannya masih belum ada perubahan tingkat perekonomian keluarganya. Untuk desa Teluk Rhu, khususnya di dusun Sungai Pucuk, lebih efisien, karena dengan sedikit usaha yang dilakukan pemerintah, mereka para petani sudah mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Selanjutnya, usaha pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang adalah dengan dikucurkannya program UED-SP. Program ini sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi pedagang, karena mereka mendapat tambahan modal. Jadi, jika dilihat tingkat efisiensinya, usaha pemerintah dalam bentuk program UED-SP ini sangat efisien, karena keinginan pemerintah agar terjadi penguatan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?, Dalam hal ini, sejauhmana hasil pelaksanaan program pemerintah telah memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Pemecahan masalah yang paling diharapkan adalah terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat yang berada di daerah

3T. Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh masyarakat desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara mengenai apakah usaha yang dilakukan sudah memecahkan masalah penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T, sebagai berikut:

“Para nelayan yang proposalnya lolos dan dapat bantuan dari pemerintah, namun sering kali mereka mendapat bantuan 1 (satu) unit speedboat untuk 3 (tiga) kepala keluarga. Karena proposal yang mereka ajukan dengan berkelompok, dan mereka mengajukan sebanyak anggota yang ada namanya dalam proposal, misalnya 10 unit, namun hanya dapat 3 (tiga) unit saja pak, jadi susah mereka membagikannya pak, jadi mesinnya orang lain, bodinya orang lain lagi, jadi ujung-ujungnya dijual oleh mereka, supaya mereka dapat membagi secara merata kepada sesama anggota kelompok nelayan. Anggarannya sekian, terima sekian, padahal anggota ramai, tentu payah membaginya”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Teluk Rhu di atas, dapat diketahui bahwa program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat belum mencukupi, karena tidak sesuai dengan permintaan. Dari segi jumlahnya saja sudah dapat diketahui bahwa program tersebut tidak mencukupi dan bahkan sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk membagikan kepada anggota kelompoknya. Ketidacukupan program yang diberikan oleh pemerintah memberikan dampak negatif bagi terlaksananya program pemerintah itu sendiri. Dan pada gilirannya sudah barang tentu program-program tersebut akan tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.

Pemerataan

Pemerataan dalam evaluasi kebijakan merupakan kriteria yang harus dinilai, karena salah satu kriteria agar kebijakan itu dikatakan baik yakni ketika kebijakan merata diberikan kepada kelompok sasaran yang berbeda-beda. Pertanyaan yang perlu disam-

paikan dalam mengevaluasi kebijakan dari kriteria pemerataan ini adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?. Dalam penelitian ini, apakah program-program yang diberikan pemerintah sudah merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di daerah 3T. berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Teluk Rhu, sebagai berikut:

“... Para nelayan untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah ini harus mengajukan proposal terlebih dahulu, banyak juga diantara mereka yang proposalnya tidak jebol, atau tidak diterima oleh pemerintah. Dalam artian masih banyak nelayan yang tidak merasakan bantuan dari program pemerintah, program pemerintahnya tidak merata gitu-lah”.

“... Bagi yang proposalnya tidak lolos, kadang-kadang mereka minjam duit di UED-SP, kalau disetujui mereka membeli sampan kayu dengan mesin Yamaha atau Suzuki. Kadang ada juga yang memiliki sedikit bidang tanah, lalu dijual, dan beli sampan. Mereka tidak mendapat bantuan, jadi harus berusaha sendiri. Jadi program-program pemerintah ini tidak semua nelayan dapat”.

Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program-program yang disediakan oleh pemerintah masih belum merata kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Para masyarakat yang memiliki kenalan di pemerintahan, misalnya anggota DPRD, mereka akan mendapat program bantuan, namun bagi yang tidak memiliki kenalan, mereka tidak akan mendapat program bantuan dari pemerintah.

Responsifitas

Responsifitas juga merupakan kriteria yang harus dinilai dalam evaluasi kebijakan, karena salah satu kriteria agar kebijakan itu dikatakan baik yakni ketika kebijakan memuaskan kebutuhan kelompok sasaran. Pertanyaan yang perlu disampaikan dalam

mengevaluasi kebijakan dari kriteria responsifitas ini adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?. Dalam penelitian ini, apakah program-program yang diberikan pemerintah sudah memuaskan seluruh masyarakat yang membutuhkan di daerah 3T. berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Teluk Rhu, sebagai berikut:

“... kalau ditanya tentang program bantuan yang diberikan pemerintah, apakah memuaskan? semuanya sangat memuaskan, karena program itu adalah program pemberian gratis, siapa yang tidak mau, tapi yang jadi masalah adalah, program-program yang diberikan tidak cocok dengan kebutuhan kami, seperti pemberian kapal besar untuk menjaring ikan dan kapal piber, kami tak perlu kapal seperti itu, selain itu bantuan yang tak cukup untuk dibagi kepada anggota kelompok, minta 10 unit, cuman dikasi 3 unit”

Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program pemerintah yang diberikan masih belum memuaskan kelompok sasaran, walaupun mereka mengatakan puas, namun faktanya mereka masih belum puas akan program yang diberikan. Program yang diberikan masih tidak sesuai kebutuhan dan jumlah yang diberikan juga tidak sesuai dengan anggota kelompok.

Ketepatan

Kriteria ketepatan ini penting untuk mengevaluasi kebijakan, dengan pertanyaan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Dalam penelitian ini, apakah program-program yang diberikan pemerintah benar-benar berguna dan bernilai bagi seluruh masyarakat khususnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam membahas kriteria-kriteria evaluasi yang lain, seperti kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsifitas, dapat diketahui bahwa program-program pemerin-

tah yang diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, seperti bantuan kapal penangkap ikan, dan kapal piber tidak berguna dan tidak bernilai, karena tidak digunakan oleh masyarakat, dan tetap tertambat saja di dekat jembatan sungai kecil dekat pasar di desa teluk Rhu.

Namun program pemerintah yang diberikan kepada petani dan pedagang, tidak sama yakni masih memberikan kegunaan yang banyak bagi masyarakat petani dan pedagang. Seperti program bantuan bibit, racun, dan pupuk bagi petani dan program UED-SP bagi para pedagang. Program-program bagi para petani dan pedagang ini sangat berguna bagi penguatan ekonomi para petani dan pedagang. Program pemberian pupuk bagi petani, dapat meringankan biaya bagi para petani dalam menyediakan pupuk untuk pertaniannya. Begitu juga bantuan bibit, dapat meningkatkan kualitas pertanian masyarakat, karena bibit yang biasa diambil oleh masyarakat adalah bibit karet kampong, sedangkan bibit bantuan dari pemerintah adalah bibit unggul, tentunya hal ini akan sangat berguna dan bernilai untuk meningkatkan produktifitasnya.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah 3T, terutama dalam rangka penguatan ekonominya. Secara umum masalah atau kendala-kendala yang dihadapi di daerah 3T antara lain: 1) Untuk Pengembangan Sumber daya Manusia, masalah yang di hadapi adalah kurangnya sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, kurangnya gedung dan guru, fasilitas sekolah dan lain-lain, 2) Untuk pengembangan Pertanian / Perkebunan masalah yang di hadapi adalah kurangnya keahlian petani, sarana prasarana pertanian, mesin / peralatan pengolahan hasil tani, 3) Tidak adanya dermaga desa untuk empat kapal-kapal berlabuh sehingga tidak ada retribusi kapal-kapal yang bersandar di Pangkalan Nyirih untuk mening-

katkan PADes dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan usaha perdagangan untuk meningkatkan ekspor kelapa, 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan limbah kelapa untuk diolah menjadi barang jadi yang bernilai jual tinggi, 5) Kerusakan Hutan Bakau yang mulai menguatirkan dan tidak adanya pengelolaan hutan karena belum adanya peraturan Desa, 6) Tidak adanya keahlian masyarakat tentang pembudidayaan ikan air tawar, udang dan ketam, tidak adanya modal masyarakat, tidak adanya sistem pengelolaan air pasang, dan tidak adanya penyediaan bibit ikan, udang dan ketam.

Secara khusus, kendala-kendala yang dihadapi berbeda-beda antara nelayan, petani, dan pedagang:

- a) **Nelayan**, Permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain: 1) Sulitnya membuat proposal agar lolos seleksi. "Masalahnya, untuk mendapat bantuan ini kita kan harus membuat proposal dulu, sementara agar proposal ini jebol, tentu kita harus mencari orang yang kita kenal di Dinas, misalnya anggota Dewan, yang ada kenalan dapatlah dia, tapi kalau yang tidak ada kenalan sama sekali, mereka tidak dapat bantuan". (wawancara tanggal 3 Agustus 2016), 2) Bantuan yang diberikan tidak cukup. "Para nelayan yang proposalnya lolos dan dapat bantuan dari pemerintah, namun sering kali mereka mendapat bantuan 1 (satu) unit speedboat untuk 3 (tiga) kepala keluarga. Karena proposal yang mereka ajukan dengan berkelompok, dan mereka mengajukan sebanyak anggota yang ada namanya dalam proposal, misalnya 10 unit, namun hanya dapat 3 (tiga) unit saja pak, jadi susah mereka membagikannya pak, jadi mesinnya orang lain, bodinya orang lain lagi, jadi ujung-ujungnya dijual oleh mereka, supaya mereka dapat membagi secara merata kepada sesama anggota kelompok nelayan. Itu yang menjadi masalah pak" (wawancara tanggal 3

Agustus 2016). 3) Tidak mau menyimpan untuk keperluan mendatang. “Memang pak, kalau nelayan ini, makannya mewah pak, makannya ikan terus, ikan besar-besar, kemudian mau ngambil beras tinggal ambil sama toke, belanja anak hari ini bias 10 ribu rupiah per hari. Yang jadi masalah kemewahan itu hanya untuk hari ini saja, mereka tidak pernah menyimpan untuk keperluan mendatang. Sekadar untuk cukup makan hari ini saja. Untuk urusan besok, katanya besok kan melaut lagi bisa ngambil lagi sama toke, teros seperti itu, tidak ada kemajuan”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

4) Pola pikir yang salah. “Masyarakat nelayan sulit untuk maju disebabkan pola pikir yang masih belum tepat, mereka memiliki pola pikir; para nelayan tidak percaya dengan kebun pak, kebun ini membuang duit dulu berjuta-juta, sementara kalau beli jarring udang pak, hari ini beli besok sudah dapat modal pak. Mereka tidak sabar untuk berkebun dengan beli bibit dulu, kemudian ditanami, diurusi sampai dapat diambil hasilnya”. 5) Tidak berani dan kurangnya keahlian. “Pernah diberikan bantuan berupa kapal besar khusus untuk menangkap ikan yang dilengkapi dengan robot penarik jarring, mereka tetap saja tidak berani, karena untuk kapal-kapal besar tersebut biasanya untuk menjaring ikan di laut luas, mereka tidak berani, akibatnya kapal bantuan itu tidak digunakan sampai sekarang, sudah lama tersadai dekat jembatan, padahal sudah bermilyaran rupiah harganya. Selain tidak berani, mereka tidak punya keahlian untuk menggunakan kapal tersebut untuk berlayar di laut besar”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016)

b) Petani. Permasalahan yang dihadapi petani, antara lain: 1) Harga karet yang terlalu rendah. “Para petani karet sering menghadapi masalah dalam hal harga, karena harga sering tidak sta-

bil, apalagi harga sekarang jauh sekali turun, kalau dulu harga karet yang dianggap stabil adalah apabila harga per kilogram karet sama dengan harga per kilogram beras”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016). 2) Mahalnya harga pupuk. “Harga pupuk yang mahal sehingga masyarakat tidak sanggup membelinya, harga sekarung pupuk sudah sejuta lebih, belum lagi mau bayar angsuran UED-Sp lagi, dan akibatnya karet yang ada sekarang tidak dipupuk lagi, padahal seharusnya karet itu dipupuk dua kali dalam setahun, akibatnya hasil karet juga menurun”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016). 3) Kebakaran. “Terjadinya kebakaran, kadang-kadang karet yang sudah ditanami sudah mulai besar, tiba-tiba kena bakar, habiislah. Kebiasaan orang sini setiap tahun buat ladang untuk menanam padi, jadi untuk mengolah lahan mereka sering menggunakan cara dengan membakar, sehingga kadang-kadang terjadi kebakaran yang merebak sampai ke kebun-kebun warga”. 4) Tidak memiliki keahlian menanam. “Kurangnya keahlian dalam menanam, menanam yang dilakukan selama ini dengan cara orang kampung aja pak, siap nanam dah tinggal”. 5) Jarak kebun yang jauh dari kediaman dan akses jalan menuju kebun yang jelek.

c) Pedagang. Permasalahan yang dihadapi pedagang antara lain: 1) Hutang. “Kalau berdagang masyarakat kami ini yang tak enaknyanya adalah hutang yang tak tahan, masyarakat sini hutang rajin bayar tak rajin, kalau tak dikasi akan dikatakan “eh sombongnya”. “Sebab itu pak disini, kalau berdagang, orang luar lebih maju, karena orang akan tak berani hutang, dan walaupun hutang, mereka akan tidak segan-segan untuk menagih hutangnya kembali. Jadi orang tempatan, lebih bagus diarahkan ke pertanian karet atau sawit”. “Jadi kalau saya li-

hat, pedagang-pedagang yang maju disini adalah orang-orang pendatang, ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, karena mereka tidak dihutangi. Kalau orang tempatan, payah mau maju, karena mereka akan rentan dihutangi, dan yang berhutang bukanlah orang lain, mereka adalah masih ada hubungan family semua. Jadi kalau orang tempatan sebainya berkebun ajalah". (wawancara tanggal 3 Agustus 2016).

2) Tidak siap bersaing. "Untuk berdagang ni pak, orang sini jiwanya belum terbiasa untuk saling memahami, kalau satu orang buka kedai, kemudian orang lain yang tidak terlalu jauh rumahnya buka kedai juga, kalau dikota kan tidak ada masalah, tapi kalau disini tidak bisa pak, mereka akan bertengkar, atau tidak akan teguran, mereka tidak siap bersaing".

3) Kurangnya modal.

Prioritas Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan prioritas pembangunan yang dapat dilakukan di daerah 3T dalam rangka penguatan ekonomi masyarakatnya:

a) Nelayan: 1) Program pelatihan bagi nelayan yang mulai mau bertani, agar para nelayan mau merubah profesi dari nelayan ke petani atau jadi petani dan nelayan. "Ikan ini tidak jelas pak perputarannya pak, kelam ni tak tentu, sekarang melaut belum tentu dapat, setiap kali turun ke laut mau pergi menjaring, kami harus menyiapkan modal untuk umpan ikan, dan minyak mesin minimal 150 ribu rupiah, jika tidak dapat maka sudah tekor (rugi) 150 ribu rupiahlah kami. Jadi kalau mau merubah ekonomi nelayan, maka caranya adalah dengan cara merubah pola hidup atau merubah matapencaharian, yakni tidak hanya sebagai nelayan, tapi juga sebagai petani". (wawancara tanggal 3 Agustus 2016).

2) Pemberian modal bagi

para petani agar mau beralih profesi ke Petani. "Agar mereka semangat untuk merubah profesi dari nelayan ke petani kebun, maka mereka paling tidak harus diberikan modal pak, misalnya modal tanam, karena mereka rata-rata sudah memiliki lahan walaupun sedikitlah, tapi sekarang ni masalahnya mereka meiliki lahan tapi, mau mengolah susah, mengolah lahan akan butuh biaya, jadi perlu bantuan, bantuan bibit, bantuan kebun melalui kelompok-kelompok".

3) Program pendampingan bagi para nelayan yang juga berprofesi sebagai petani.

4) Program bantuan untuk budidaya ikan kakap, ini sangat potensi di desa Teluk Rhu. Namun harus disertai modal oleh pemerintah. Terkait dengan prioritas pembangunan bagi nelayan, Penelitian Sartika (2011) menyimpulkan bahwa salah satu alternatif kebijakan pemberdayaan nelayan yang dapat dicoba adalah intervensi pemerintah dalam usaha perikanan, baik yang bersifat tradisional maupun berbasis klaster industri. Pemberdayaan yang berbasis klaster industry perikanan lebih menekankan pada perbaikan sistem operasi perikanan, mulai dari perbaikan armada penangkapan sampai ke peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan. Pemberdayaan nelayan lainnya difokuskan pada pengembangan pengolahan tradisional dengan berbagai upaya perbaikan, terutama terkait dengan perbaikan proses pengolahan, rasionalisasi, dan standarisasi, serta jaminan dan pengawasan mutu.

b) Petani. 1) Pembangunan akses jalan menuju lokasi kebun-kebun masyarakat. 2) Bantuan pupuk untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian, 3) Bibit karet unggul.

c) Pedagang, 1) Program bantuan modal bagi usaha kecil menengah. 2) Pembangunan akses jalan untuk mendukung kelancaran proses jual beli.

d) Pariwisata, 1) Pembangunan jalan menuju lokasi wisata, mulai dari Dumai sampai ke lokasi wisata di Pulau Rupat bagian utara. 2) Homestay yang sudah ada yakni milik masyarakat harus diberi dorongan dan bantuan agar fasilitasnya bias dilengkapi lagi. 3) Bantuan modal untuk kedai-kedainasi, agar para wisatawan mudah dalam mencari makanan ketika berada di kawasan wisata. 4) Bantuan modal kepada pengusaha kedai makanan ringan, terutama kedai-kedai yang menjual makanan khas lokal.

Dari semua prioritas kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan yang disebutkan di atas, prioritas utama untuk penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T adalah program pembangunan akses jalan dan jembatan. Karena dengan akses jalan dan jembatan yang baik semua potensi-potensi yang ada, baik itu potensi pertanian, perkebunan, perikanan, maupun potensi wisata secara otomatis akan mudah ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Tonny (2011) yang mengatakan bahwa pembangunan jaringan jalan internal Kabupaten Bengkalis dan sarana pendukungnya yang terintegrasi (*linkage*) melalui titik-titik simpul (*node*) dengan ruas jalan menuju arah Sumatera Utara, Pekanbaru dan Sumatera Selatan penting untuk mendapat prioritas pembangunan guna mendukung pergerakan barang di internal dan eksternal Kabupaten Bengkalis. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat, agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, maka taraf hidup masyarakatnya harus dinaikkan dengan cara peningkatan kualitas pendidikan, dengan cara memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik Pulau Rupat untuk disekolahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan

dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program-program, baik berupa program pelatihan maupun program bantuan kepada masyarakat, masih belum maksimal. Dari enam kriteria evaluasi yang digunakan, yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan pemerataan, semuanya menunjukkan masih belum sesuai dengan kriteria.

Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah 3T, khususnya di Pulau Rupat dalam rangka penguatan ekonominya, antara lain: Permasalahan nelayan a) Sulitnya membuat proposal permohonan bantuan agar lolos seleksi karena tidak punya kenalan, b) Bantuan yang diberikan tidak cukup, yang dipinta 10 unit diberikan hanya 3 unit, padahal mereka berkelompok yang terdiri dari beberapa KK, c) Tidak mau menyimpan untuk keperluan mendatang, d) Pola fikir yang salah, yang menganggap berkebun hanya menghabiskan waktu dan dana saja, e) Tidak berani dan kurangnya keahlian, karena nelayan terbiasa dengan alat-alat untuk menangkap ikan yang tradisional. Ketika ada bantuan alat yang lebih bagus dan modern mereka tidak bisa menggunakannya. Permasalahan Petani a) Harga karet yang terlalu rendah, tidak sebanding dengan harga per kilogram beras, b) Mahalnya harga pupuk, sehingga banyak petani yang tidak memupuk kebun karetnya, akibatnya produktifitas karet menurun, c) Sering terjadi kebakaran, yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang mengolah lahan untuk menanam padi setiap tahunnya dengan cara membakar, d) Tidak memiliki keahlian menanam, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan mencoba beralih ke petani, e) Jarak kebun yang jauh dari kediaman dan akses jalan menuju kebun yang jelek. Permasalahan pedagang a) Hutang, b) Tidak siap bersaing, c) Kurangnya modal. Ketiga masalah di atas terjadi di desa Teluk Rhu, dan tidak terjadi di desa Pangkalan Nyirih. Di desa Pangkalan Nyirih, perdagangan masyarakat sangat maju dengan bantuan modal dari UED-SP.

Prioritas pembangunan dalam rang-

ka penguatan ekonomi di daerah 3T, antara lain: Nelayan: a) Program pelatihan bagi petani pemula, agar para nelayan mau merubah profesi dari nelayan ke petani atau jadi petani dan nelayan, b) Pemberian modal bagi para petani agar mau beralih profesi ke Petani, c) Program pendampingan bagi para nelayan yang juga berprofesi sebagai petani, d) Program bantuan untuk budidaya ikan kakap, ini sangat potensi di desa Teluk Rhu harus disertai modal oleh pemerintah. Petani: a) Pembangunan akses jalan menuju lokasi kebun-kebun masyarakat, b) Bantuan pupuk untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian, c) Bibit karet unggul, d) Pembangunan pabrik karet, agar harga karet tidak terlalu rendah. Pedagang: a) Program bantuan modal bagi usaha kecil menengah, b) Pembangunan akses jalan untuk mendukung kelancaran proses jual beli. Dan prioritas dibidang Pariwisata: a) Pembangunan jalan menuju lokasi wisata, mulai dari Dumai sampai ke lokasi wisata di Pulau Rupa bagian utara, b) Homestay yang sudah ada yakni milik masyarakat harus diberi dorongan dan bantuan agar fasilitasnya bisa dilengkapi lagi, c) Bantuan modal untuk kedai-kedai nasi, agar para wisatawan mudah dalam mencari makanan ketika berada di kawasan wisata, d) Bantuan modal kepada pengusaha kedai makanan ringan, terutama kedai-kedai yang menjual makanan khas lokal.

Dari semua prioritas kebijakan pemerintah yang harus menjadi prioritas utama untuk penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T adalah program pembangunan akses jalan dan jembatan, dan program peningkatan kualitas pendidikan, dengan cara memberikan beasiswa kepada putra putri terbaik Pulau Rupa untuk disekolahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminudin, Muhammad. 2007. Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin. (Tesis tidak dipublikasi), Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Aprilia, Hera. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul. (Tesis tidak dipublikasi), Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Dunn, William N. 2003 *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs. N.J.: Prectice - Hall. Inc.
- Ghofur, Abd. 2014. Problematika Pembangunan Pulau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 6 (1).
- Sartika, Ika. 2011. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11 (2).
- Tonny, Judiantono. 2011. Analisis Pola dan Estimasi Pergerakan Barang Sebagai Pertimbangan prioritas Pembangunan Jalan di Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau. *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota Universitas Islam Bandung*, 2 (11).